

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber keuangan utama bagi Pemerintah. Pemerintah selalu melakukan upaya peningkatan pembayaran pajak dari tahun ke tahun agar pembangunan negara dapat tercapai. Hal tersebut membuahkan hasil pendapatan pajak Negara semakin yang tahun semakin tinggi. Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan Negara dari pajak mencapai Rp 156,8 triliun atau 11,32 persen hingga 7 Maret 2018, dari target perolehan pajak tahun ini Rp 1.424,7 triliun. Angka tersebut masih jauh di bawah *tax ratio* sejumlah negara tetangga (Deny, 2018). Tingkat kesadaran wajib pajak masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, hal tersebut dibuktikan dari *tax ratio* yang baru menempati angka 11,32 persen dari target (Wicaksono, 2018).

Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak Indonesia masih belum optimal. Penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak, semakin tinggi rasio pajak suatu negara.

maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Darmawan & Sukartha, 2014).

Amri (2015) menyatakan penghindaran pajak merupakan suatu hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pemungutan pajak sehingga dapat mengakibatkan rendahnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak disini sering diartikan dengan adanya pemanfaatan celah-celah kekosongan ataupun ketidak jelasan undang-undang peraturan perpajakan, misalnya dengan menghemat pembayaran beban pajak. Penghindaran pajak tersebut kebanyakan dilakukan oleh wajib pajak badan dalam bentuk *tax avoidance*. Dalam hal ini, pemerintah Direktorat Jendral Pajak tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum terhadap penghindar pajak, meskipun *tax avoidance* ini dapat mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Praktek *tax avoidance* ini sebenarnya menyebabkan suatu dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, tetapi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Fenomena tentang penghindaran pajak pada tahun 2016, yaitu adanya kebocoran dokumen finansial berskala luar biasa. Peristiwa tersebut merupakan kebocoran data terbesar didunia yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama atau disebut "*Panama Papers*". Pihak-pihak dalam Panama Papers tersebut terkait dengan berbagai perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah *offshore* (*tax haven countries*). Data berkapasitas 2,6 terabyte dengan periode pencatatan selama 40 tahun sejak 1977 sampai awal 2015 memuat informasi lebih dari 214 ribu perusahaan cangkang pada 21

jurisdiksi *offshore*. Informasi tersebut memungkinkan publik mengintip bagaimana dunia *offshore* mengalirkan uang gelap di jagat finansial global secara rahasia. Hal ini mendorong lahirnya banyak modus dalam merampok pundi-pundi negara dari pajak yang tak dibayarkan, walaupun kepemilikan perusahaan cangkang pada dasarnya tidak melawan hukum.

Istilah baru yang muncul dalam Panama Papers ialah “Perusahaan Cangkang” atau *shell corporation*. PPATK mendefinisikan *shell corporation* sebagai perusahaan yang secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan melakukan kegiatan usaha, melainkan melakukan transaksi fiktif maupun menyimpan aset pendirinya ataupun orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut. Dengan demikian, mereka dapat bertindak sebagai penghindar pajak (*tax avoidance*) untuk bisnis yang sah. Fungsi penghindaran pajak inilah yang membuat perusahaan cangkang digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan ‘manuver-manuver’ keuangan. Guna memuluskan hal tersebut, terdapat firma-firma yang berlaku sebagai pembuat perusahaan cangkang. Keberadaannya biasanya terletak di negara-negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven countries*) seperti Panama, Barbados, Hong Kong dan British Virgin Islands (BVI).

Contoh nyata kasus Lionel Messi tahun 2007 dan 2009 yang melakukan penggelapan dan penipuan pajak di Spanyol dengan nilai £4 juta dan dikenakan denda sebesar £2 juta. Penyebabnya yakni tarif pajak penghasilan yang terlampau tinggi di Spanyol, sehingga menyebabkan para wajib pajak berpenghasilan besar memalsukan atau mengalihkan pendapatan. Selain tarif pajak yang tinggi,

Spanyol juga telah melaksanakan penegakan hukum perpajakan yang ketat dan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan wajib pajak, salah satu keberhasilan hal tersebut terbukti dengan menguaknya kasus Messi. Mengacu pada undang-undang perpajakan, Messi seharusnya melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya sebagai pesepakbola. Ada dua hal utama yang harus dipahami yaitu seluruh penghasilan berarti termasuk penghasilan di luar sepakbola, misalnya *image right*, dan walaupun berkebangsaan Argentina, karena ia bekerja di Spanyol, maka Messi sah terhitung sebagai wajib pajak Spanyol.

Sebelum sistem perpajakan yang sekarang berlaku, Spanyol memiliki sistem perpajakan yang dikenal sebagai *The Beckham Law*. Mereka yang berada di bawah *The Beckham Law* hanya dikenai tarif pajak penghasilan flat sebesar 24,75%. Sayangnya, kebijakan yang menguntungkan ini diamanatkan tahun 2009 dan berlaku sejak 1 Januari 2010, karena krisis ekonomi yang terjadi di Spanyol. Akibatnya, seluruh wajib pajak harus membayar pajak dengan tarif progresif yang telah ditetapkan. Sistem baru ini menetapkan tarif PPh orang pribadi di Spanyol secara progresif antara 24,75% sampai 52%. Tarif progresif ini berarti tarif pajak penghasilan yang dibebankan kepada wajib pajak tidak hanya satu tarif tetapi bertingkat.

Tarif pajak yang tinggi ini memaksa Messi melakukan tindakan pencurian (penggelapan pajak). Pernyataan tersebut sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh Mihir A.Desai, dkk dalam jurnal *Theft and Taxes (2006)* yang menyatakan bahwa karakteristik sistem pajak suatu perusahaan mempengaruhi jumlah pengalihan yang berlangsung pada suatu negara dan perusahaan tersebut,

tarif pajak yang lebih tinggi memperburuk tata kelola perusahaan, sementara penegakan hukum pajak yang kuat dapat memperbaiki kondisi tersebut. Selain itu pajak bagi perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan sensitivitas penerimaan. Hubungan antara tingkat pajak dan tingkat pendapatan tergantung pada kondisi pemerintahan dimana respon yang baik diperoleh dalam lingkungan pemerintahan yang stabil.

Penghindaran pajak dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah *size*. Ukuran perusahaan (*size*) ini merupakan pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, di antaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan (Suwito & Herawaty, 2005). Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan berakibat pada manajer perusahaan untuk bertindak patuh (*compliances*) atau malah agresif dalam membayar pajak (Suprapti, 2017).

Setiap perusahaan pasti menginginkan laba yang tinggi dan beban pajak yang rendah, cara untuk mencapai tujuan perusahaan salah satunya adalah dengan dilakukannya perencanaan target keuangan oleh manajemen dimana ukuran variabel target keuangan adalah ROA. ROA mencerminkan seberapa efisien pengelolaan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba pada perusahaan. ROA juga merupakan indikator dalam menentukan pencapaian keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang dipatok oleh direksi, jadi semakin tinggi kinerja

keuangan yang dicapai oleh manajemen maka semakin tinggi juga tekanan yang diperoleh oleh manajemen (Prasastie, 2015).

Dengan adanya laba yang tinggi, maka kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dikatakan baik. Tingginya kinerja keuangan suatu perusahaan dapat menimbulkan tekanan eksternal bagi manajemen perusahaan tersebut. Tekanan eksternal merupakan tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi harapan dan persyaratan tertentu kepada pihak ketiga (Suprapti, 2017). Oleh karena itu, manajemen akan berupaya mencapai target yang diinginkan direksi dengan melakukan kecurangan seperti penghindaran pajak untuk meningkatkan laba yang tinggi (SAS No. 99). Tekanan eksternal ini dapat diukur dengan menggunakan leverage, karena leverage menunjukkan seberapa besar kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan. Semakin besar kewajiban yang harus dipenuhi, maka terjadi tekanan untuk memenuhi kewajiban melunasi dan membayar beban bunga. Semakin tinggi leverage semakin tinggi sumber pendanaan dari utang dan risiko kredit yang juga tinggi (Suprapti, 2017). Rasio Leverage (Rasio Hutang), rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar. Semakin tinggi hutang suatu perusahaan, pajak yang dibayarkan semakin rendah.

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya Dewi & Noviari (2017) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas*, dan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan

penelitian Febriana (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, ukuran perusahaan dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menyatakan bahwa *profitabilitas* dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dan *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kemudian Suprapti (2017), meneliti tentang pengaruh tekanan keuangan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa target keuangan berpengaruh negatif tetapi *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dari uraian tersebut, peneliti tertarik mengambil judul Pengaruh Size, Target Keuangan, dan Tekanan Eksternal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur karena adanya inkonsistensi hasil penelitian dari peneliti terdahulu dan adanya perbedaan pengukuran pada variabel ukuran perusahaan.

Alasan penulis memilih perusahaan manufaktur sebagai obyek penelitian karena terdapat adanya inkonsistensi pendapat peneliti terdahulu dalam hal penghindaran pajak, sehingga peneliti ingin menguji kembali.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran diatas, maka rumusan masalahnya adalah apakah Size, Target Keuangan, dan Tekanan Eksternal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan:

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah Size, Target Keuangan, dan Tekanan Eksternal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Manfaat:

Penelitian ini diharapkan mempunyai peran dan bermanfaat dalam perkembangan ilmu ekonomi kedepannya, khususnya bidang akuntansi. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur ilmu Akuntansi, khususnya dalam kajian tentang pengaruh Size, Target Keuangan, dan Tekanan Eksternal terhadap Penghindaran Pajak.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi lembaga/organisasi khususnya bagi pemerintah terkait untuk evaluasi untuk menanggulangi praktik penghindaran pajak.